

SIKAP PRESIDEN RODRIGO DUTERTE ATAS PUTUSAN *PERMANENT COURT OF ARBITRATION* (PCA) TENTANG SENGKETA LAUT CHINA SELATAN ANTARA FILIPINA DAN TIONGKOK

Oleh : Arie Ferdinandsyah

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis sikap Presiden Filipina, Rodrigo Duterte terhadap putusan arbitrase *Permanent Court of Arbitration* (PCA) yang memenangkan gugatan Filipina terhadap Tiongkok pada 2016, berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS). Permasalahan utama penelitian ini adalah mengapa Duterte menolak menjalankan putusan PCA atas sengketa Laut China Selatan antara Filipina dan Tiongkok, hubungan pemerintahan Duterte dengan negara dan organisasi regional yang berkepentingan dalam sengketa Laut China Selatan, dan implikasinya terhadap sengketa di kawasan tersebut.

Hasil penelitian menemukan bahwa kepribadian dan gaya politik Duterte berpengaruh besar dalam sikapnya terhadap putusan PCA atas sengketa Laut China Selatan. Keyakinan emosional dan sikap pragmatismenya membuat Duterte menjalin hubungan yang akomodatif terhadap kepentingan ekonomi Tiongkok untuk mendapatkan keuntungan ekonomi bagi Filipina. Kepribadian dan gaya politik Duterte memungkinkannya mengubah sikap terhadap putusan PCA dan Tiongkok ketika manfaat kerja sama tidak sesuai yang diharapkan. Maka, penelitian ini menekankan bahwa faktor individu berperan penting dalam membentuk kebijakan luar negeri Duterte terhadap putusan PCA atas sengketa Laut China Selatan dengan Tiongkok.

Kata kunci: Rodrigo Duterte, PCA, Laut China Selatan, UNCLOS

ABSTRACT

This research analyzes the stance of the President of the Philippines, Rodrigo Duterte on the arbitral award of the Permanent Court of Arbitration (PCA) that ruled in favour of the Philippines over China in 2016, based on the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). The main issue of this research is about why Duterte refused to implement the PCA arbitral award on the South China Sea dispute between the Philippines and China, relations between Duterte's government with countries and regional organizations that have interests in the South China Sea, and its implications for the dispute in the region.

Results of this research find that the personality and political style of Duterte have a significant influence on his stance to the PCA arbitral award on the South China Sea dispute. Emotional beliefs and his pragmatic stance made Duterte cultivate an accommodating relationship to the economic interests of China to gain economic

benefits for the Philippines. Duterte's personality and political style enable him to change his stance on the PCA award and China when the benefits of the cooperation did not deliver as expected. Hence, this research underscores that individual factors play a significant role in shaping the foreign policy of Duterte to the PCA arbitral award on the South China Sea dispute with China.

Keywords: *Rodrigo Duterte, PCA, South China Sea, UNCLOS*

PENDAHULUAN

Sengketa di Laut China Selatan adalah salah satu konflik maritim paling kompleks di dunia. Ini dikarenakan banyaknya negara yang terlibat dan nilai strategis lautan ini sebagai jalur perdagangan internasional, yang dilewati sebesar 21% dari nilai keseluruhan perdagangan global. Kawasan ini juga mempunyai sumber daya perikanan yang besar serta potensi sumber energi fosil yang belum dieksplorasi secara mendalam. Potensi cadangan minyak bumi di Laut China Selatan diperkirakan sebesar 11 miliar barel dan potensi gas alam sebesar 30-72 triliun meter kubik.¹

Kompleksitas sengketa di Laut China Selatan tergambar jelas dari negara-negara yang terlibat. Terdapat negara-negara Asia Tenggara dengan pesisir menghadap Laut China Selatan yang memiliki klaim teritorial berbeda-beda dan tumpang tindih, yakni Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Negara-negara tersebut mendasarkan klaim masing-masing pada *United Nations Conventions on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, yang mengatur garis wilayah laut negara sejauh 200 mil laut dari pesisir.² Kemudian terdapat Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Republik Tiongkok (Taiwan), yang sama-sama mendasarkan klaim pada sembilan garis putus-putus (*nine-dash line*). Konsep ini awalnya dicetuskan oleh Republik Tiongkok dalam peta kepulauan di Laut

China Selatan pada 1947 dan telah mengalami perubahan sebanyak dua kali; pada 1952 dan 2013.³ Meski telah bertahan lama, *nine-dash line* bukan istilah resmi dari kedua negara. Klaim tersebut menimbulkan perselisihan dengan negara-negara Asia Tenggara yang memiliki klaim wilayah di Laut China Selatan karena meliputi sebagian besar kawasan ini (sebanyak 85 persen dari luas Laut China Selatan)⁴, bersinggungan dengan seluruh garis klaim dari negara-negara tersebut, dan didasarkan pada argumen historis Tiongkok sebagai negara pertama yang menemukan, menamakan, menjelajahi dan mengambil sumber daya di Laut China Selatan sejak 2.000 tahun yang lalu, ketimbang UNCLOS.⁵

Dalam sengketa Laut China Selatan, klaim Filipina mencakup sebagian dari kepulauan Spratly yang dinamakan Gugusan Pulau Kalayaan (*Kalayaan Island Group*). Kalayaan berada sekitar 400 kilometer dari sebelah barat Filipina dan terdiri dari 53 pulau. Sejarah klaim Filipina atas Kalayaan bermula dengan status kepulauan tersebut yang *terra nullius* (tidak bertuan) pasca Perang Dunia

³ George K. Ndi, "Philippines v China: assessing the implications of the South China Sea arbitration," *Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs*, advance online publication, 2016, <https://doi.org/10.1080/18366503.2016.1244142>.

⁴ *Ibid.*

⁵ The State Council The People's Republic of China, "Position Paper of the Government of the People's Republic of China on the Matter of Jurisdiction in the South China Sea Arbitration Initiated by the Republic of the Philippines," english.gov.cn, 2014, http://english.www.gov.cn/archive/press_briefing/2014/12/07/content_281475020441708.htm.

¹ Zou, Keyuan. *Routledge Handbook of the South China Sea*. Routledge, 2021.

² "United Nations Convention on the Law of the Sea" (United Nations, 1982).

II, tepatnya tahun 1947. Memanfaatkan status tersebut, pada tahun 1956, seorang pebisnis Filipina bernama Tomas Cloma mendirikan negara bernama Kalayaan (*Freedomland*) di atas kepulauan tersebut. Negara *Freedomland* diakui oleh Filipina namun tidak diakui dan dikecam oleh RRT, Republik Tiongkok, Vietnam dan Perancis. Akhirnya, di tahun yang sama Tomas Cloma menyerahkan klaimnya kepada pemerintah Filipina.⁶

Filipina menanggapi klaim sembilan garis putus-putus Tiongkok dengan mengajukan gugatan kepada Mahkamah Arbitrase Internasional (*Permanent Court of Arbitration* atau PCA) pada 22 Januari 2013, yang mengacu kepada *Annex VII* UNCLOS.⁷ Kedua negara merupakan pihak yang meratifikasi konvensi tersebut. Ini adalah gugatan atau arbitrase pertama yang diajukan oleh negara pengklaim wilayah Laut China Selatan kepada PCA. Merespon gugatan Filipina, Tiongkok menyatakan tidak akan mengikuti proses arbitrase dan tidak akan menghargai putusan yang diterbitkan nantinya, dalam *note verbale* yang diberikan Kedutaan Besar Tiongkok di Manila kepada Kementerian Luar Negeri Filipina pada 19 Februari 2013.⁸ Beijing kemudian mengeluarkan *position paper* khusus untuk menanggapi arbitrase ini pada 7 Desember

2014. Dalam dokumen tersebut, Tiongkok berargumen bahwa UNCLOS tidak berlaku untuk sengketa Laut China Selatan dan klaim Filipina tidak konsisten dengan UNCLOS.⁹ Meskipun begitu, pada 29 Oktober 2015 PCA memutuskan untuk mengesahkan yurisdiksinya dalam kasus ini, sehingga proses arbitrase tetap berlanjut sesuai dengan ketentuan dalam UNCLOS.¹⁰ RRT tetap menjadi pihak dalam kasus ini dan terikat oleh keputusan pengadilan, sebagaimana ketentuan dalam hukum internasional.¹¹

Pada 12 Juli 2016, PCA mengeluarkan putusan akhir mengenai gugatan Filipina terhadap klaim Tiongkok di Laut China Selatan. Hasil arbitrase memenangkan gugatan Filipina, dengan putusan sebagai berikut: (1) konsep *nine-dash line* Tiongkok bertentangan dengan UNCLOS karena RRT telah meratifikasi perjanjian tersebut; (2) Tiongkok tidak memiliki hak historis atas sumber daya di dalam *nine-dash line* yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) atau landas kontinen Filipina; dan (3) menyatakan bahwa tiada satu pun fitur geografi pasang naik dapat digolongkan sebagai “pulau” yang dapat menopang kehidupan ekonomi atau hunian manusia, namun hanya sebatas “bebatuan” yang berdasarkan UNCLOS tidak memberikan hak atas garis ZEE atau landas kontinen.¹²

Dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri Tiongkok yang dikeluarkan di hari yang sama saat putusan PCA diterbitkan, Beijing menganggap putusan tersebut tidak sah dan tidak mengikat, serta menolak untuk menerima ataupun mengakuinya. Akan tetapi, Tiongkok

⁶ Muhammad Nasir dan Wan Siti Adibah Wan Dahalan, *Sejarah Perebutan Kepulauan Spratly dari Perspektif Negara-Negara Yang Bertikai* (Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2022).

⁷ *Annex VII* dari UNCLOS mengatur mekanisme arbitrase. Pasal 1 menjelaskan tata cara dari arbitrase itu sendiri. “Mengacu pada ketentuan-ketentuan dari Bagian XV, tiap pihak dalam suatu sengketa dapat mengumpulkan aduan sengketa kepada prosedur arbitrase yang disediakan dalam *Annex* ini melalui pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada satu pihak atau pihak-pihak lain dalam sengketa itu. Pemberitahuan tersebut harus dilengkapi dengan suatu pernyataan dari klaim dan alasan-alasan yang mendasarinya.”

⁸ Lowell Bautista, “The South China Sea Arbitral Award amidst Shifting Philippine Foreign Policy,” *The Korean Journal of International and Comparative Law* 6, no. 1 (2018): 47–65, <https://doi.org/10.1163/22134484-12340097>.

⁹ The State Council The People’s Republic of China, “Position Paper of the Government of the People’s Republic of China on the Matter of Jurisdiction in the South China Sea Arbitration Initiated by the Republic of the Philippines.”

¹⁰ Ndi, “Philippines v China: assessing the implications of the South China Sea arbitration.”

¹¹ Bautista, “The South China Sea Arbitral Award amidst Shifting Philippine Foreign Policy.”

¹² *Ibid.*

menyatakan akan meneruskan jalur negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa dan menghindari eskalasi sengketa dalam dua dokumen yang berkaitan dengan sengketa Laut China Selatan.¹³

Meski putusan PCA memenangkan Filipina, pemerintah Filipina yang baru di bawah Presiden Rodrigo Duterte menunjukkan sikap yang tidak tegas. Pada 18 Oktober 2016, Duterte mengadakan kunjungan ke Beijing untuk membuka kerja sama baru dengan Tiongkok, dan beliau memberi pernyataan sebagai berikut:

“Bukanlah hal yang sopan dan menunjukkan itikad baik jika saya membukanya (putusan PCA). Dan jika Anda mengatakan, pembahasannya akan dikesampingkan? Tentu saja, itu harus dikesampingkan”.

Dalam kunjungan yang sama, Duterte juga menyebutkan bahwa beliau akan menunggu Xi Jinping sebagai Presiden Tiongkok untuk mengungkit putusan PCA terlebih dahulu.¹⁴ Duterte memutuskan mengambil sikap berbeda terhadap Tiongkok mengenai putusan PCA ketimbang presiden sebelumnya, Benigno Aquino karena beliau meragukan komitmen Amerika Serikat untuk melindungi Filipina seandainya terjadi perang dengan Tiongkok.¹⁵

¹³ Hsiao-Chi Hsu, “The Political Implications of the South China Sea Ruling on Sino-Philippine Relations and Regional Stability,” dalam *Asian Yearbook of International Law*, vol. 21 (2017).

¹⁴ Benjamin Kang Lim, “Philippines’ Duterte says S.China Sea arbitration case to take ‘back seat,’” *Reuters*, Oktober 2016, <https://www.reuters.com/article/us-china-philippines/philippines-duterte-says-south-china-sea-arbitration-case-to-take-back-seat-idUSKCN12J10S/>.

¹⁵ Richard Javad Heydarian, “Tragedy of Small Power Politics: Duterte and the Shifting Sands of Philippine Foreign Policy,” *Asian Security* 13, no. 3 (2017): 220–36, <https://doi.org/10.1080/14799855.2017.1354569>.

Kemudian, dalam forum Laut China Selatan pada 23 November 2018, Sekretaris Pertahanan Filipina pada saat itu, Delfin Lorenzana mengatakan bahwa ketika keputusan PCA hendak dikeluarkan, Duterte meminta para anggota kabinet pemerintahan untuk tidak terlalu merayakan hasil putusan tersebut agar tidak menyinggung pihak Tiongkok.¹⁶ Meski begitu, pasca putusan PCA Lorenzana juga menekankan bahwa program modernisasi angkatan bersenjata Filipina akan dilanjutkan.

Tanda-tanda perubahan kebijakan pemerintahan Rodrigo Duterte juga terlihat dari pernyataan para delegasi Filipina lain setelah keluarnya putusan PCA. Seperti instruksi dari Duterte, Sekretaris Luar Negeri Perfecto Yasay ‘hanya’ menyambut putusan tersebut dan mengajak rakyat Filipina untuk menahan diri dan bersabar. Kemudian, Yasay juga mengikuti saran Kamboja untuk tidak memasukkan keputusan PCA dalam *Joint Communiqué* ASEAN dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN yang diadakan di Laos. Mantan presiden Filipina yang pada awal pemerintahan Duterte bertindak sebagai perwakilan khusus ke Tiongkok, Fidel Ramos juga menyarankan untuk mengesampingkan hasil putusan PCA agar diplomasi bilateral pemerintah Duterte dan Tiongkok berjalan lebih lancar.¹⁷

Sebagai salah satu instrumen tertua dan tertinggi dalam rezim hukum internasional, PCA menjatuhkan putusan yang signifikan bagi kedudukan Filipina terhadap Tiongkok dalam kontestasi wilayah Laut China Selatan. Tindakan reklamasi yang dilakukan Tiongkok secara agresif sebelum keluarnya putusan tersebut meningkatkan *power* namun memperburuk hubungan bilateral dengan Filipina, hubungan regional dengan Asia Tenggara

¹⁶ Christopher Paller Gereale, “Decoding the Duterte Doctrine: Understanding Strategic Changes in Philippine Foreign Policy during Duterte Administration,” *Global Focus* 4, no. 1 (2024): 4–21, <https://doi.org/10.21776/ub.jgf.c2024.004.01.1>.

¹⁷ *Ibid.*

dan reputasinya secara global. Dengan posisi Tiongkok yang tertekan, Manila sepatutnya memanfaatkan putusan PCA untuk semakin menegaskan posisi klaimnya kepada masyarakat internasional, seperti bersuara di Majelis Umum PBB, membentuk gugatan tambahan terhadap tindakan serupa Tiongkok bersama negara pengaku lainnya dalam sengketa ini, dan mendorong negara-negara lain untuk melakukan operasi *freedom of navigation* (kebebasan berlayar).¹⁸ Namun, pada kenyataannya Filipina di bawah pemerintahan baru Duterte enggan menjalankan putusan PCA dan cenderung berusaha meredakan ketegangan dengan Tiongkok sebagai pihak tergugat. Kontradiksi antara putusan PCA yang seharusnya menguntungkan Filipina sebagai aktor negara dalam menghadapi sengketa wilayahnya di Laut China Selatan dan sikap pemerintahan Duterte yang tidak tegas dalam menegakkan putusan tersebut menjadi suatu masalah yang layak untuk diteliti.

KERANGKA TEORI

Teori Kebijakan Luar Negeri

Teori yang digunakan sebagai alat analisis adalah kebijakan luar negeri (*foreign policy*). Analisis kebijakan luar negeri adalah seperangkat kajian tentang keputusan-keputusan dari orang-orang pengambil keputusan, yang mengacu pada atau berdampak terhadap entitas di luar negara mereka. Teori ini tidak mengkaji satu keputusan semata, namun sekumpulan keputusan yang diambil berdasarkan keadaan tertentu. Keputusan kebijakan luar negeri sepatutnya dilihat sebagai momen peningkatan komitmen dalam proses aksi, reaksi, aksi balasan, dan seterusnya yang berlangsung dalam berbagai tingkat dan melibatkan aktor yang beragam. Keputusan yang ada sebaiknya dikaji

secara runut, karena dapat berubah seiring waktu. Fokus penyelidikan juga dapat meliputi tahapan pengambilan keputusan, mulai dari pengenalan masalah, pembedaan (*framing*), persepsi, prioritas tujuan, perencanaan kontinjensi, dan pemilihan opsi.¹⁹

Secara keseluruhan, terdapat lima tingkat analisis kebijakan luar negeri, mulai dari individu, kelompok kecil, politik domestik, identitas nasional dan budaya, dan atribut nasional serta sistem internasional. Tingkat pertama, yakni individu awalnya sering digunakan pada dekade 1930an dengan pendekatan “Great Man Theory”, menurun pada Perang Dingin, dan populer lagi pasca Perang Dingin, yang disertai kemajuan ilmu psikologi dengan kemunculan paradigma kognitivis. Kegunaan tingkat analisis individu dipengaruhi oleh jenis rezim negara yang dikaji, ketertarikan pemimpin terhadap kebijakan luar negeri, situasi genting negara yang memaksa tingkat pimpinan tertinggi untuk bertindak, karakter atau watak pemimpin bersangkutan, kemampuan diplomasi pemimpin, pengetahuan pemimpin mengenai isu atau kawasan yang relevan, serta interaksi kelompok pengambil kebijakan.²⁰

Penelitian ini akan berfokus pada tingkat analisis pemimpin, karena sikap Rodrigo Duterte dalam kebijakan luar negeri Filipina terhadap sengketa Laut China Selatan dengan Tiongkok tidak mencerminkan tindakan yang rasional, yakni menegaskan dan menegakkan putusan PCA. Sikap presiden Rodrigo Duterte juga berbeda drastis dengan pemerintahan Filipina sebelumnya di bawah presiden Benigno Aquino yang melawan secara langsung agresi Tiongkok dengan membawa sengketa Laut China Selatan ke pengadilan internasional (menggunakan *lawfare* atau jalur hukum)

¹⁸ Peter Kreuzer, *Dealing with China in the South China Sea: Duterte Changing Course*, with Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, PRIF Report 2018/3 (Peace Research Institute Frankfurt (PRIF), 2018).

¹⁹ Valerie M Hudson, *Foreign Policy Analysis*, ed. kedua (Rowman & Littlefield, 2014).

²⁰ *Ibid.*

dan mendekatkan kerja sama keamanan dengan negara-negara yang memiliki kepentingan berlawanan dengan Tiongkok (*external balancing*) yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Jepang.²¹

Analisis kebijakan luar negeri secara individu meliputi konstruksi proses psikologis pikiran individu. Pikiran manusia memproses masukan yang disebut kognisi (*cognition*), dan menyaringnya dalam bentuk stereotipe, bias, dan heuristik. Manusia memiliki keterbatasan dalam memproses masukan (*bounded rationality*), yang kerap menyebabkan kesalahan memperhitungkan suatu kemungkinan dan pemrosesan bukti empiris. Emosi juga mempengaruhi proses pemikiran, terlebih lagi dalam kondisi diri yang panas ketimbang ketika sedang tenang. Manusia cenderung lebih sensitif pada kondisi ketidakadilan dan kondisi yang merugikan ketimbang kondisi yang menguntungkan. Selain itu, kondisi fisik seperti penyakit mental, pengalaman stres, penggunaan narkoba, penyakit fisik, dan kelelahan juga mempengaruhi proses kognitif. Keadaan eksternal juga mempengaruhi proses pengambilan keputusan, yang dipengaruhi unsur-unsur seperti kehadiran pihak tertentu, waktu yang tersedia, kegentingan situasi tersebut, serta aturan dan peran sosial.²²

TINGKAT ANALISIS: INDIVIDU

Tingkat analisis, yang terdiri dari unit-unit analisis adalah unsur yang penting dalam penelitian Hubungan Internasional karena tiga kegunaan. Kegunaan pertama adalah unit analisis memberikan deskripsi yang sangat akurat terhadap fenomena yang dikaji. Maka, tingkat analisis yang digunakan harus sebisa mungkin objektif dan empiris. Kedua, unit analisis mampu menjelaskan keterkaitan dalam fenomena yang diselidiki. Kegunaan ketiga unit analisis sebagai model analisis adalah

kemampuannya untuk menghadirkan prediksi terhadap fenomena lain yang serupa.²³

Unit analisis yang menjadi fondasi penelitian ini adalah individu. Tingkat analisis ini berfokus pada para pemimpin yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri yang dikaji. Perspektif ini berfokus pada pemimpin karena umumnya serangkaian peristiwa yang terjadi disebabkan oleh pilihan dan keputusan yang diambil individu pemegang kekuasaan. Terdapat dua lingkup unit analisis individu, yang pertama adalah kepribadian pemimpin bersangkutan dan mengkaji watak, kepercayaan, dan nilai yang dimiliki individu tersebut sebagai faktor dan motivasi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Cakupan yang kedua adalah persepsi yang mempengaruhi suatu pemimpin negara. Lingkup ini akan membahas bagaimana individu yang dikaji memproses peristiwa dan keadaan yang berkaitan. Konsep *framing* dari ilmu psikologi kerap digunakan, yang merupakan kecenderungan orang untuk menilai resiko dari keadaan yang dilihat sendiri.²⁴

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan sebagai alat untuk menemukan hasil dan pembahasan dari penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksplanatif dengan proses berpikir deduktif. Pendekatan kualitatif merupakan metode untuk menghasilkan penelitian yang menjelaskan pernyataan tertulis dan perilaku-perilaku yang dapat diamati dari subjek-subjek penelitian. Penelitian eksplanatif berfungsi untuk mendapatkan informasi mengenai pengaruh kualitas variabel tertentu (variabel independen) terhadap variabel lain (variabel

²¹ Kreuzer, *Dealing with China in the South China Sea*.

²² Hudson, *Foreign Policy Analysis*.

²³ J. David Singer, "The Level-of-Analysis Problem in International Relations," *World Politics* 14, no. 1 (1961): 77–92, <https://doi.org/10.2307/2009557>.

²⁴ Marijke Breuning, *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction* (Palgrave Macmillan, 2007).

dependen).²⁵ Deduksi adalah proses berpikir dari premis-premis umum, dalam konteks penelitian ini berupa teori kebijakan luar negeri, menuju premis-premis khusus yakni penjabaran dari sikap-sikap Presiden Filipina, Rodrigo Duterte yang tidak mau menjalankan putusan PCA terhadap sengketa Laut China Selatan antara negaranya dan Tiongkok, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan analisis dokumen. Analisis dokumen dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengkaji ulang atau mendalami dokumen-dokumen cetak dan digital yang berkaitan dengan penelitian secara sistematis. Data dalam dokumen tersebut kemudian dipilah, ditafsirkan, dan disintesis menjadi satu kesatuan tema, kategori, dan contoh kasus melalui analisis konten.²⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjaga Hubungan Baik dengan Tiongkok

Peningkatan kerja sama ekonomi antara Filipina dan Tiongkok menjadi faktor utama sikap Duterte yang mengabaikan putusan PCA dan sikapnya yang lunak terhadap sengketa Laut China Selatan dengan negara tersebut. Ketegangan kedua negara di LCS membuat Filipina tidak dimasukkan dalam megaprojek infrastruktur global *Belt and Road Initiative* (BRI), yang diluncurkan Tiongkok pada 2013, sebelum Duterte menjabat.²⁷

Inisiatif Duterte untuk menjalin hubungan baik dengan Tiongkok ditandai dengan kehadirannya dalam *Belt and Road Forum for International Cooperation* pada Mei 2017. Indikator lain adalah kunjungan pertama Duterte ke Beijing pada 18 Oktober 2016 bersama 200 pebisnis Filipina, yang dilakukan ketika ia baru memulai menjabat sebagai Presiden.²⁸

Sikap Duterte yang lunak terhadap Tiongkok memperbaiki hubungan ekonomi kedua negara. Ini ditandai dengan masuknya proyek BRI ke Filipina, yang bernilai \$24 miliar dan meliputi sepuluh proyek infrastruktur besar. Investasi BRI sendiri bekerja sama dengan program infrastruktur Duterte bertajuk *Build Build Build* sehingga sesuai dengan strategi kepresidenan Duterte yang berfokus pada pembangunan infrastruktur.²⁹

Indikator selanjutnya dari peningkatan hubungan ekonomi antara Tiongkok dan Filipina pada kepresidenan Duterte adalah pertumbuhan perdagangan bilateral yang mencapai 17% tiap tahun. RRT juga menjadi salah satu negara dengan nilai investasi terbesar di Filipina.³⁰ Tidak hanya itu, kedua negara menyepakati *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk sama-sama mengembangkan sumber daya alam yang terdapat di LCS pada 2018.³¹ Kerja sama ekonomi kedua negara yang semakin erat juga ditandai dengan bantuan Tiongkok kepada Filipina untuk menghadapi pandemi Covid-19 pada 2020, yang berupa

²⁵ Bagong Suyanto dan Sutinah Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, ed. 3 (Prenadamedia Group, 2005).

²⁶ Glenn A. Bowen, "Document Analysis as a Qualitative Research Method," *Qualitative Research Journal* 9, no. 2 (2009): 27–40, <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>.

²⁷ Renato Cruz De Castro, "From appeasement to soft balancing: the Duterte administration's shifting policy on the South China Sea imbroglio," *Asian Affairs: An American Review*, advance online publication, 2020, <https://doi.org/10.1080/00927678.2020.1818910>.

²⁸ Aaron Jed Rabena, "The Complex Interdependence of China's Belt and Road Initiative in the Philippines," *Asia Pacific Policy Studies* 5 (2018): 683–97, <https://doi.org/10.1002/app5.257>.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Songying Fang dan Xiaojun Li, "Southeast Asia under Great-Power Competition: Public Opinion About Hedging in the Philippines," *Journal of East Asian Studies* 22 (2022): 481–501, <https://doi.org/10.1017/jea.2022.35>.

³¹ Ellen T. Tordesillas, "The PH-China MOU on cooperation on oil and gas development," *Verafiles*, 2018, <https://verafiles.org/articles/ph-china-mou-cooperation-oil-and-gas-development>.

suplai medis, alat-alat pengujian virus, dan vaksin.³²

Meski terdapat banyak inisiatif kerja sama ekonomi antara Filipina dan Tiongkok pada kepresidenan Duterte, pada kenyataannya berbagai kerja sama tersebut menunjukkan hasil yang tidak sesuai harapan. Sebagian besar pendanaan program *Build Build Build* berasal dari Jepang sebesar 80 persen ketimbang BRI, dan banyak proyek-proyek kerja sama BRI yang tidak berjalan, seperti proyek Bendungan Kaliwa dan irigasi Sungai Chico yang ditunda.³³ Berbagai proyek kerja sama kedua negara juga mendapat kritikan di dalam negeri karena dianggap menggadaikan kedaulatan Filipina di LCS, terutama pada kasus MoU eksplorasi bersama di kawasan tersebut. Duterte kemudian mencabut negosiasi MoU tersebut pada 24 Juni 2022, menjelang masa jabatannya berakhir dan disebabkan oleh kebuntuan negosiasi dengan RRT.³⁴

Kepribadian Duterte

Kepribadian Duterte yang mempengaruhi sikapnya terhadap putusan PCA dan sengketa LCS adalah keyakinan emosionalnya. Menurut Magcamit, persepsi Duterte dipengaruhi oleh tiga indikator. Indikator pertama adalah emosi menentukan pemilihan dan penafsiran bukti kepercayaan terhadap Tiongkok, serta ketidakpercayaannya kepada AS. Kemudian, indikator kedua yakni emosi yang menciptakan dan menguatkan kepercayaan Duterte terhadap RRT dan AS. Indikator ketiga adalah perasaan Duterte terhadap Beijing dan Washington memengaruhi keinginannya dan keyakinan mengenai apa yang benar terkait kedua

negara besar tersebut beserta pemimpinnya.³⁵

Keyakinan emosional menciptakan generalisasi terhadap aktor negara dengan kepastian yang melebihi bukti yang ada. Emosi dan perasaan mempengaruhi keinginan, kepercayaan, dan tindakan dari pemimpin negara. Pemimpin negara akan kehilangan kepercayaan penilaiannya sendiri jika kebenaran emosi dan perasaan yang bersangkutan terhadap kasus tertentu digoyahkan oleh keyakinan emosionalnya. Dalam kasus Duterte, tingkat kepercayaannya terhadap AS dan RRT membentuk hubungan emosional yang mempengaruhi persepsi atau keinginannya untuk menjalin hubungan dengan kedua negara tersebut.³⁶

Pandangan Duterte terhadap AS cenderung bersifat negatif, yang dipengaruhi oleh faktor sejarah AS sebagai bekas penjajah Filipina. Kritikan dari negara-negara Barat terhadap sikapnya yang otoriter hanya memperkuat keyakinan emosional Duterte. Sedangkan pandangan Duterte terhadap RRT cenderung positif, yang ditandai dengan pernyataannya dalam kunjungan pertama ke negara tersebut yang menyebut Tiongkok sebagai negara damai namun dicap sebagai negara jahat oleh negara-negara Barat.³⁷

Sikap terhadap resiko dapat bergantung pada perasaan ketimbang penilaian objektif. Ini dapat menjelaskan sikap Duterte yang memanipulasi penegasan putusan PCA dan menghubungkannya dengan eskalasi konflik di LCS, sehingga mengubah sikap dan perasaan kubu pendukungnya yang memperbesar persepsi resiko. Ketakutan Duterte menghadapi perang dengan Tiongkok membuat objek dari ketakutan

³² Fernan Talamayan, "The Philippine Pivot to China and Russia: Duterte's Foreign Policy Revisited," *Asia Review* 12, no. 3 (2022): 451–77, <https://doi.org/10.24987/SNUACAR.2022.4.12.3.4> 51.

³³ *Ibid.*

³⁴ Theresa Martelino-Reyes, "Energy crisis looms as PH drops joint oil and gas exploration with China," *Verafiles*, 2022, <https://verafiles.org/articles/energy-crisis-looms-as-ph-drops-joint-oil-and-gas-exploration-with-china>.

³⁵ Michael Magcamit, "To feel is to believe: China, United States, and the emotional beliefs of Philippines' Rodrigo Duterte," *Political Science* 73, no. 1 (2021): 6–30, <https://doi.org/10.1080/00323187.2021.1967764>.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

tersebut semakin terasa nyata dan memicu persepsi resiko subjektif terhadap objek tersebut. Perasaan Duterte yang semakin positif terhadap RRT membuat bukti keyakinannya semakin mudah dipercaya. Maka, ia cenderung konsisten menyampaikan kepada masyarakat Filipina bahwa mereka lebih membutuhkan Tiongkok ketimbang sebaliknya, dan harus tetap rendah hati untuk mendapatkan kemurahan hati Xi Jinping.³⁸

Ciri kepribadian Duterte juga terlihat dari pidato-pidato kenegaraannya. Terdapat lima kategori sifat bicara yakni asertif, komisif, ekspresif, deklaratif, dan direktif. Sifat asertif menjadi sifat paling menonjol, namun Duterte menunjukkan kelima sifat berbicara dan tidak ada sifat yang benar-benar dominan dalam gaya berpidatonya. Pidato-pidato Duterte menunjukkan bahwa ia mampu menyampaikan pesan-pesan sesuai dengan konteks, namun kecenderungannya untuk menggunakan kata-kata tajam atau kasar menunjukkan ia tidak segan untuk mengutarakan pandangan dan ketegasan terhadap kebijakannya.³⁹

Peningkatan kerja sama ekonomi antara Filipina dan Tiongkok pada masa kepresidenan Duterte menciptakan ketergantungan tersendiri dari Duterte terhadap Tiongkok. Indikator pertama bersifat tidak langsung, berupa tukar guling sikap akomodatif Filipina di LCS agar RRT dapat membantu menggagalkan resolusi *United Nations Human Rights Council* (UNHRC) pada 2019 untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM dari perang anti-narkoba Duterte. Tiongkok gagal melobi empat negara dekatnya, yakni Brazil, Pakistan, Republik Demokratik Kongo, dan Afrika Selatan, untuk menolak resolusi sehingga membuat

resolusi tersebut menang dengan selisih empat suara.⁴⁰

Indikator lainnya adalah sikap Duterte yang tidak selektif dalam memilih kerja sama dengan Tiongkok. Proyek bandara internasional di Cavite direncanakan dibangun oleh *China's Communications Construction Company Ltd* (CCCC), yang masuk dalam daftar hitam AS karena keterlibatannya dalam reklamasi pulau-pulau buatan di LCS. Meski muncul tuntutan pembatalan, proyek tersebut tetap berlanjut tanpa sanksi kepada CCCC. Lalu, pada September 2020, Sekretaris Pertahanan Delfin Lorenzana mengungkapkan bahwa AFP menjalin kerja sama dengan *Dito Telecommunity Corp*, yang kepemilikannya dimiliki *China Telecom* sebesar 40%. Kerja sama tersebut dikritik karena berpotensi membuka jaringan informasi militer dan pemerintahan Filipina terhadap penyusupan dari *China Telecom*.

Gaya Politik Duterte

Gaya Duterte dalam berpolitik yang menjadi ciri khasnya adalah populisme. Menurut Cass Mudde dikutip dari Tenorio, populisme adalah ideologi yang substansinya tipis dan memandang masyarakat terbagi menjadi dua kelompok yang saling bertentangan, yakni “rakyat yang murni” dengan “elite yang korup”. Duterte memenuhi definisi tersebut dengan sikapnya yang mengonstruksi “rakyat” secara vertikal sebagai golongan tertentu yang mengecualikan kalangan elite (oligarki dan politisi korup) dan kalangan bawah (pengedar dan pengguna narkoba yang didehumanisasi). Secara internasional dan horizontal, AS dan negara-negara Barat serta institusi internasional yang mengkritik kebijakan kontroversialnya

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Aprillette Cada Devanadera dan Ericson Alieto, “Speech Act Analysis of Duterte’s Commemorative Speeches,” *Science International (Lahore)* 31, no. 3 (2019): 513–20.

⁴⁰ Walden Bello, “A Major Diplomatic Defeat for Duterte — And His Allies in Beijing,” *FPiF*, 22 Juli 2019, <https://fpif.org/a-major-diplomatic-defeat-for-duterte-and-his-allies-in-beijing/>.

menjadi lawan dari rakyat Filipina sebagai bentuk perlawanan anti-kolonial.⁴¹

Menurut Engesser dkk, terdapat lima ciri dari pemimpin yang populis. Ciri pertama adalah menekankan kedaulatan rakyat, yang menjadi pembelaan Duterte terhadap kritikan Obama atas perang anti narkoba yang disampaikan dalam KTT ASEAN 2016. Ciri kedua adalah mengaku sebagai bagian rakyat dan mengklaim sebagai pembela rakyat. Ciri ketiga adalah menyerang kelompok elite, dan ciri keempat yakni mengucilkan kelompok lain yang dianggap sebagai musuh “rakyat”. Ciri kelima adalah mengungkit daerah pedalaman (*hinterland*). Ciri kedua hingga kelima terlihat jelas dalam narasi kampanye pencalonan presiden Duterte,⁴² dan ciri kelima terlihat dari pemindahan sebagian aktivitas politik Duterte ke pulau asalnya, Mindanao.⁴³

Analisis Sikap Duterte

Untuk menganalisis sikap seorang pemimpin negara dalam pengambilan kebijakan luar negeri, perlu dikaji karakter dari individu yang bersangkutan. Karakter individu terdiri dari tiga unsur umum, yakni kemauan untuk menghadapi hambatan, keterbukaan terhadap informasi baru, dan kekuatan internal atau eksternal sebagai pendorong kebijakannya. Jika dilihat dari delapan orientasi kepribadian yang dikonstruksi oleh Margaret G. Hermann, sikap Duterte termasuk dalam orientasi kepribadian *evangelistic*. Orientasi tersebut dicirikan dengan menantang hambatan (kritis terhadap AS), menutup diri terhadap informasi baru (cenderung enggan menarik pernyataan kontroversialnya mengenai LCS bahkan setelah dikritik konstituennya), dan

berfokus membangun hubungan baik dengan pihak lain (gaya politik populis dan sikap akomodatif terhadap Tiongkok).⁴⁴

Unsur kepribadian individu lain yang mempengaruhi sikap adalah emosi dan persepsi. Dalam konteks Duterte, keyakinan emosionalnya yang negatif terhadap AS dipengaruhi oleh ingatan sejarah negara tersebut dan negara-negara Barat lain yang menjajah Filipina serta negara-negara Asia lain di masa lampau.⁴⁵ Kemudian, persepsi terdiri dari penyaring informasi berupa bias, stereotipe, dan heuristik. Ketiga penyaring tersebut juga dipengaruhi oleh emosi pemimpin bersangkutan. Keyakinan emosional Duterte yang negatif terhadap AS dan positif terhadap Tiongkok menciptakan bias tersendiri. Gaya politik populis Duterte juga menciptakan stereotipe, yang menggolongkan masyarakat menjadi kalangan rakyat yang “baik” dan elite yang “buruk”, serta demonisasi negara-negara Barat dan institusi internasional yang dipandang dikuasai pihak Barat. Lalu, dalam konteks heuristik, persepsi Duterte dipengaruhi oleh kemampuannya memproses informasi, memperhitungkan power relatif Filipina, opsi kebijakan yang dapat diambil serta hasil yang muncul setelahnya.⁴⁶

Faktor terakhir penentu sikap pemimpin adalah situasi atau keadaan eksternal, yang dalam konteks Duterte dipengaruhi dua faktor penting yakni kondisi geopolitik global dan politik dalam negeri Filipina. Duterte dihadapkan pada masa transisi kekuatan global dunia, antara AS yang telah menjadi sekutu lama Filipina, dan Tiongkok yang menjadi musuh Filipina di LCS namun mengancam kedudukan AS sebagai hegemon dunia. Determinan kedua adalah politik dalam

⁴¹ Christine B Tenorio dkk., “President Duterte’s bicephalous leadership: Populist at home - pragmatic abroad,” *Asian Journal of Comparative Politics*, 2020, 1–15, <https://doi.org/10.1177/2057891120912008>.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Nicole Curato, *A Duterte Reader: Critical Essays on Rodrigo Duterte’s Early Presidency* (BUGHAW, 2017).

⁴⁴ Hudson, *Foreign Policy Analysis*.

⁴⁵ Tenorio dkk., “President Duterte’s bicephalous leadership: Populist at home - pragmatic abroad.”

⁴⁶ Magcamit, “To feel is to believe: China, United States, and the emotional beliefs of Philippines’ Rodrigo Duterte.”

negeri, karena masa jabatan Duterte dibatasi selama satu periode saja, yang menciptakan kendala waktu tersendiri bagi Duterte untuk meninggalkan kesan positif bagi rakyatnya.

Jika dipadukan, seluruh unsur karakter individu tersebut dapat dijelaskan dengan runut sesuai dengan model pikiran Valerie M. Hudson. Pertama, ciri kepribadian Duterte yang *evangelistic* serta konstruksi kepercayaan dan emosionalnya yang anti-Barat menciptakan model mentalitas yang lebih percaya kepada Tiongkok ketimbang institusi internasional dan negara-negara Barat, terutama AS. Dalam negeri, Duterte menjembatani kontradiksi tersebut dengan realita di LCS melalui komunikasi publik yang menggalang pandangan positif terhadap RRT. Kemudian, berbagai unsur penyaring informasi berubah menjadi proses kognisi.

Situasi eksternal mempengaruhi cara berpikir Duterte, yang ditandai dengan keyakinannya untuk mendekatkan diri kepada Tiongkok sebagai negara pemimpin dunia di masa depan, dan mitra yang paling mampu untuk membantu proyek pembangunan dalam negeri untuk meninggalkan kesan positif dalam masa kepresidenannya yang berjalan relatif singkat. Maka, model mentalitas, proses kognisi, dan situasi bergabung menciptakan suatu sikap luar negeri Duterte yang mendekatkan hubungan Filipina dengan Tiongkok, yang ditandai dengan perilaku dan sikap pidatonya yang cenderung tunduk terhadap kekuasaan Tiongkok di LCS dan mengabaikan putusan PCA.

Implikasi Sikap Duterte Terhadap Konflik Laut China Selatan

Sikap Duterte yang mengabaikan putusan PCA dan memilih untuk mendekatkan hubungan bilateral dengan Tiongkok pada mulanya berdampak positif dalam sektor ekonomi, namun, tindakan RRT terhadap Filipina di LCS cenderung tidak berubah. Pada Juni 2018, terdapat laporan kru kapal penjaga pantai Tiongkok yang masuk ke kapal nelayan Filipina dan

mengambil paksa tangkapan mereka. Kemudian, pada Juli 2018 Manila mengungkapkan kekhawatiran kepada Beijing mengenai peningkatan peringatan radio dari RRT kepada kapal dan pesawat terbang Filipina di kawasan LCS yang direklamasi Tiongkok. Pada Desember 2018, militer Filipina melaporkan keberadaan 275 kapal nelayan Tiongkok di sekitar pulau Thitu, yang mendorong protes diplomatik kepada negara tersebut. Agresi Tiongkok di LCS tetap berlanjut selama pandemi Covid-19, yang ditandai dengan berjalannya pangkalan riset RRT di Terumbu *Fiery Cross* dan *Subi*, aktivitas di pangkalan militer, dan insiden antara korvet RRT dan fregat AL Filipina pada Februari 2020 di sekitar Terumbu *Recto*.⁴⁷

Kebijakan Duterte selama masa jabatannya yang kontroversial terhadap Amerika Serikat, yakni pengusiran pasukan khusus AS dari Mindanao pada 2016, ancaman pembatalan Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) di tahun 2017, penangguhan VFA pada 2020 dan berbagai pernyataannya yang mengkritik AS mengenai perang anti narkoba menandakan menjauhnya hubungan kedua negara, yang tidak lazim karena status Filipina sebagai sekutu AS. Amerika Serikat merespon sikap Duterte dengan memprioritaskan stabilitas hubungan kedua negara dalam kebijakan strategisnya. Respon tersebut ditandai dengan pengiriman 10 pesawat intai baru kepada militer Filipina dan pembaruan operasi anti terorisme di Filipina pada Juli 2017, serta kunjungan perwakilan AS pada 2018 ke Manila untuk memastikan komitmen AS terhadap keamanan Filipina.⁴⁸

Meski Duterte berkali-kali mengungkapkan kehendaknya untuk menjauhi hubungan dengan AS, kenyataannya kerja sama keamanan kedua

⁴⁷ De Castro, "From appeasement to soft balancing: the duterte administration's shifting policy on the South China Sea imbroglio."

⁴⁸ *Ibid.*

negara tetap berlanjut. Ini ditandai dengan masih aktifnya latihan-latihan militer seperti Balikatan pada 2017 hingga 2019, Kamandag, dan AMPHIBEX pada 2019. Perjanjian-perjanjian keamanan kedua negara yang terus berlanjut dan pembatalan VFA pada 2 Juni 2020 menandakan bahwa sikap negatif Duterte terhadap AS cenderung retorika semata. Dapat disimpulkan bahwa strategi Duterte dalam menjalin hubungan dengan AS adalah menyeimbangkan aliansi keamanan dan hubungan ekonomi dengan Tiongkok (balancing), yang dipengaruhi oleh preferensi kelompok birokrat (departemen luar negeri) dan kelompok militer untuk tetap menjalin hubungan baik dengan AS.⁴⁹

Sikap Duterte yang tidak mau menjalankan putusan PCA juga memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan ASEAN dalam sengketa LCS dengan Tiongkok. Ketika Filipina menjadi ketua ASEAN pada 2017, Duterte mencegah adanya pernyataan yang menunjukkan sikap bermusuhan kepada Tiongkok. Ia juga tidak mengungkit putusan PCA, maupun memasukkan pernyataan yang menyinggung reklamasi dan militerisasi yang dilakukan RRT pada fitur-fitur daratan di LCS dalam pernyataan bersama ASEAN. Selama dua KTT ASEAN 2017, Duterte bersikukuh bahwa putusan PCA dan tindakan RRT di LCS adalah isu yang tidak perlu diangkat.⁵⁰

Pengaruh Duterte dalam mengubah sikap ASEAN terhadap sengketa LCS dengan RRT menunjukkan kelemahan struktural ASEAN sekaligus fungsi lembaga tersebut untuk memajukan kepentingan luar negeri Duterte. Lemahnya komitmen kolektif dan

mekanisme keamanan ASEAN dimanfaatkan oleh Duterte untuk mencerminkan sikapnya terhadap Tiongkok. Mekanisme penegakan yang tidak kuat serta penafsiran aturan dan norma ASEAN yang fleksibel membuatnya rentan dimanfaatkan negara-negara anggotanya untuk kepentingan tertentu. Kelemahan tersebut, ditambah dengan ambisi Tiongkok untuk menciptakan tatanan politik yang Sino-sentris membuat sikap Duterte dalam ASEAN mengarahkan lembaga tersebut menuju dinamika baru kawasan Indo-Pasifik dan berpotensi menimbulkan masalah baru.⁵¹

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan penelitian ini dan menggunakan teori kebijakan luar negeri Valerie M. Hudson dengan fokus analisis individu, dapat disimpulkan bahwa sikap Duterte yang menolak menjalankan putusan PCA di Laut China Selatan dipengaruhi secara signifikan oleh karakteristik kepribadian dan proses kognitifnya. Unsur-unsur tersebut diantaranya keyakinan emosional yang positif terhadap Tiongkok dan gaya politik yang populis.

Duterte menolak menjalankan putusan PCA dalam pertemuan bilateral dengan Tiongkok dan dalam forum multilateral, seperti ASEAN, untuk menjaga hubungan baik dengan Tiongkok. Sikap Duterte ditanggapi positif oleh hubungan ekonomi kedua negara membaik dengan masuknya proyek BRI ke Filipina, penandatanganan nota kesepahaman pengembangan bersama migas di LCS, serta peningkatan investasi dan aliran perdagangan dari Tiongkok. Semua bentuk kerja sama ekonomi tersebut pada awalnya mendorong pertumbuhan ekonomi Filipina.

Meski hubungan baik Duterte terhadap Tiongkok membawa berbagai kerja sama baru terutama dalam bidang

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Renato Cruz De Castro, "The Limits of Intergovernmentalism: The Philippines' Changing Strategy in the South China Sea Dispute and Its Impact on the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 39, no. 3 (2020): 335–58, <https://doi.org/10.1177/1868103420935562>.

⁵¹ *Ibid.*

ekonomi, implementasi dari berbagai kerja sama ekonomi tersebut membawa hasil yang tidak maksimal atau dibatalkan. Dalam sengketa LCS, tindakan Tiongkok yang melanggar kedaulatan wilayah Filipina tidak mereda setelah Duterte mengambil sikap akomodatif terhadap negara tersebut. Hasil kerja sama ekonomi yang tidak maksimal, agresi Tiongkok di LCS yang terus berlanjut, dan oposisi politik yang menguat terhadap sikap luar negerinya membuat Duterte meningkatkan kritikan terhadap Tiongkok, mengungkit putusan PCA kembali dalam berbagai kesempatan, dan mempertahankan kerja sama keamanan dengan AS yang merupakan negara pesaing Tiongkok menjelang akhir masa jabatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Breuning, Marijke. *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*. Palgrave Macmillan, 2007.
- Curato, Nicole. *A Duterte Reader: Critical Essays on Rodrigo Duterte's Early Presidency*. BUGHAW, 2017.
- Hudson, Valerie M. *Foreign Policy Analysis*. Ed. kedua. Rowman & Littlefield, 2014.
- Nasir, Muhammad, dan Wan Siti Adibah Wan Dahalan. *Sejarah Perebutan Kepulauan Spratly dari Perspektif Negara-Negara Yang Bertikai*. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2022.
- Suyanto, Bagong, dan Sutinah Sutinah. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Ed. ketiga. Prenadamedia Group, 2005.
- Zou, Keyuan. *Routledge Handbook of the South China Sea*. Routledge, 2021.

Dokumen

- "United Nations Convention on the Law of the Sea." United Nations, 1982.

Jurnal

- Bautista, Lowell. "The South China Sea Arbitral Award amidst Shifting Philippine Foreign Policy." *The Korean Journal of International and Comparative Law* 6, no. 1 (2018): 47–65.
<https://doi.org/10.1163/22134484-12340097>.
- Bowen, Glenn A. "Document Analysis as a Qualitative Research Method." *Qualitative Research Journal* 9, no. 2 (2009): 27–40.
<https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>.
- De Castro, Renato Cruz. "From appeasement to soft balancing: the duterte administration's shifting policy on the South China Sea imbroglio." *Asian Affairs: An American Review*, advance online publication, 2020.
<https://doi.org/10.1080/00927678.2020.1818910>.
- De Castro, Renato Cruz. "The Limits of Intergovernmentalism: The Philippines' Changing Strategy in the South China Sea Dispute and Its Impact on the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 39, no. 3 (2020): 335–58.
<https://doi.org/10.1177/1868103420935562>.
- Devanadera, Aprillette Cada, dan Ericson Alieto. "Speech Act Analysis of Duterte's Commemorative Speeches." *Science International (Lahore)* 31, no. 3 (2019): 513–20.
- Fang, Songying, dan Xiaojun Li. "Southeast Asia under Great-Power Competition: Public Opinion About Hedging in the Philippines," *Journal of East Asian Studies* 22 (2022): 481–501,
<https://doi.org/10.1017/jea.2022.35>.
- Heydarian, Richard Javad. "Tragedy of Small Power Politics: Duterte and the Shifting Sands of Philippine Foreign Policy." *Asian Security* 13, no. 3 (2017): 220–36.

- <https://doi.org/10.1080/14799855.2017.1354569>.
- Hsu, Hsiao-Chi. "The Political Implications of the South China Sea Ruling on Sino-Philippine Relations and Regional Stability." *Asian Yearbook of International Law*, vol. 21. 2017.
- Magcamit, Michael. "To feel is to believe: China, United States, and the emotional beliefs of Philippines' Rodrigo Duterte." *Political Science* 73, no. 1 (2021): 6–30. <https://doi.org/10.1080/00323187.2021.1967764>.
- Ndi, George K. "Philippines v China: assessing the implications of the South China Sea arbitration." *Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs*, advance online publication, 2016. <https://doi.org/10.1080/18366503.2016.1244142>.
- Paller Gerales, Christopher. "Decoding the Duterte Doctrine: Understanding Strategic Changes in Philippine Foreign Policy during Duterte Administration." *Global Focus* 4, no. 1 (2024): 4–21. <https://doi.org/10.21776/ub.jgf.c2024.004.01.1>.
- Rabena, Aaron Jed. "The Complex Interdependence of China's Belt and Road Initiative in the Philippines." *Asia Pacific Policy Studies* 5 (2018): 683–97. <https://doi.org/10.1002/app5.257>.
- Singer, J. David. "The Level-of-Analysis Problem in International Relations." *World Politics* 14, no. 1 (1961): 77–92. <https://doi.org/10.2307/2009557>.
- Talamayan, Fernan. "The Philippine Pivot to China and Russia: Duterte's Foreign Policy Revisited." *Asia Review* 12, no. 3 (2022): 451–77. <https://doi.org/10.24987/SNUACAR.2022.4.12.3.451>.
- Tenorio, Christine B, Patrik K Meyer, dan Achmad Nurmandi. "President Duterte's bicephalous leadership: Populist at home - pragmatic abroad." *Asian Journal of Comparative Politics*, 2020, 1–15. <https://doi.org/10.1177/2057891120912008>.
- Laporan**
Kreuzer, Peter. *Dealing with China in the South China Sea: Duterte Changing Course*. With Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. PRIF Report 2018/3. Peace Research Institute Frankfurt (PRIF), 2018.
- Website**
Lim, Benjamin Kang. "Philippines' Duterte says S.China Sea arbitration case to take 'back seat.'" *Reuters*, 2016. <https://www.reuters.com/article/us-china-philippines/philippines-duterte-says-south-china-sea-arbitration-case-to-take-back-seat-idUSKCN12J10S/>.
- Martelino-Reyes, Theresa. "Energy crisis looms as PH drops joint oil and gas exploration with China." *Verafiles*, 2022. <https://verafiles.org/articles/energy-crisis-looms-as-ph-drops-joint-oil-and-gas-exploration-with-china>.
- The State Council The People's Republic of China. "Position Paper of the Government of the People's Republic of China on the Matter of Jurisdiction in the South China Sea Arbitration Initiated by the Republic of the Philippines." english.gov.cn, 2014. http://english.www.gov.cn/archive/press_briefing/2014/12/07/content_281475020441708.htm.
- Tordesillas, Ellen T. "The PH-China MOU on cooperation on oil and gas development." *Verafiles*, 2018. <https://verafiles.org/articles/ph-china-mou-cooperation-oil-and-gas-development>.
- Bello, Walden. "A Major Diplomatic Defeat for Duterte — And His Allies

in Beijing,” *FPIF*, 2019.
<https://fpif.org/a-major-diplomatic-defeat-for-duterte-and-his-allies-in-beijing/>.